

**NILAI-NILAI DEMOKRASI SEBAGAI PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM DI
MAN 1 PANDEGLANG.**

Uun Kurnaesih

STIT Al Khaeriyah, Cilegon Banten
kurnaesihu7@gmail.com

Didih Muhamad Sudi

Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Syekh Manshur Pandeglang
dmsudi.ugb@gmail.com

Siti Maryam

Universitas Cendikia Abditama Tangerang
stmaryam6762@gmail.com

Supardi

MAN 2 Pandeglang
Papadspr429@gmail.com

Abstract

This study aims to find out instilling democratic values in Islamic education, there is a strategy carried out by MAN 2 Pandeglang through teaching and learning activities and also holding routine activities related to democratic behavior, both in theory in the teaching and learning process, as well as in practice in teaching and learning. student daily life. The method used in this research is descriptive qualitative analytical method using data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation studies. This research proves that education held at MAN 2 Pandeglang.

The results showed that education that contains democratic values based on an integral education system based on monotheism, namely education that integrates formal education with boarding education, among democratic values that run in the implementation of education at MAN 2 Pandeglang with various characters and personalities, students are always taught and accustomed to tolerance, mutual respect, and mutual respect for differences so that students are given the freedom to be creative and express their interests and talents in accordance with the potential of each student.

Keyword : Democratic Values, Strengthening Islamic Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam, ada strategi yang dilakukan oleh MAN 2 Pandeglang melalui kegiatan belajar mengajar dan juga mengadakan kegiatan rutin yang berhubungan dengan perilaku yang demokrasi, baik secara teori dalam proses belajar mengajar, maupun secara praktik dalam keseharian siswa. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif analitis dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, interview dan studi dokumentasi. Penelitian ini membuktikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di MAN 2 Pandeglang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang mengandung nilai-nilai demokratis yang berdasar pada sistem pendidikan integral berbasis tauhid, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan asrama, diantara nilai-nilai demokratis yang berjalan dalam penyelenggaraan pendidikan di MAN 2 Pandeglang dengan berbagai watak dan kepribadian, siswa senantiasa diajarkan dan dibiasakan untuk bersikap toleransi, saling menghormati, dan saling

menghargai perbedaan sehingga siswa diberikan ruang kebebasan untuk berkreasi dan berekspresi menyalurkan minat dan bakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa.

Kata kunci : Nilai-nilai Demokrasi, Penguatan Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak madrasah-madrasah menggunakan kurikulum yang mencerminkan adanya perbedaan terhadap anak-anak dari golongan ekonomi kuat dengan anak-anak dari golongan ekonomi yang lemah dalam menikmati pendidikan. Hal demikian yang tidak sinkron dengan amanat pendidikan nasional yang demokratis dan tentu saja bertentangan dengan moral Pancasila.¹ Padahal, pendidikan sangat penting bagi setiap individu tanpa memandang status ekonomi maupun sosial termasuk cenderung diskriminatif.² Hal ini tentunya memerlukan perhatian pemerintah untuk mengatasinya, sehingga pendidikan yang bermutu itu juga diberikan kepada masyarakat secara keseluruhan khususnya di lembaga pendidikan Islam, madrasah.

Pendidikan dan demokrasi merupakan pembelajaran yang mengajarkan bagaimana ruang kebebasan dan kemerdekaan dapat dipahami dan

dijalankan.³ Dua hal tersebut sebagai bahan untuk merefleksi penerapan pendidikan demokrasi selama ini di masyarakat dan madrasah. Secara substantif, apakah penanaman nilai-nilai keadaban, seperti menghargai keragaman, tidak mentoleransi diskriminasi, empati, adil, toleransi (tasamuh), inklusif, tidak menoleransi korupsi dan sejenisnya, kepada anak bangsa.⁴

Pada dasarnya ada dua pokok permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia, pertama; masalah pemerataan, yang berarti bagaimana seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati kesempatan pendidikan. Kedua; masalah mutu, dalam arti bagaimana pendidikan memberi dan membekali para pelajar memiliki skill yang dapat terjun dalam kehidupan

¹ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. Pertama, 2006), 124-125.

² Laudan Aron and Pamela Loprest, "Disability and the Education System," *The Future of Children* Vol. 22 No. 1 (2012), 97.

³ Aat Royhatudin, Abdul Mujib, Naf'an Tarihoran "Affective and Psychomotor Education in Islamic Religious Learning through the Use of Technology during the Covid-19 Pandemic," *Internasional Journal of Nusantara Islam* 9, no. 2 (2021): 533–547.

⁴[https://mediaindonesia.com/opini/170950/demokrasi-pendidikan-dan-pendidikan-demokrasi#:~:text=Pendidikan%20demokratis%20merupakan%20pembelajaran%20yang%20dibangun%20untuk%20mewujudkan,aman%2C%20menghidupkan%20dialog%2C%20dan%20keikutsertaan%20seluruh%20pihak%20%28Barber%3A2001%29.diakses](https://mediaindonesia.com/opini/170950/demokrasi-pendidikan-dan-pendidikan-demokrasi#:~:text=Pendidikan%20demokratis%20merupakan%20pembelajaran%20yang%20dibangun%20untuk%20mewujudkan,aman%2C%20menghidupkan%20dialog%2C%20dan%20keikutsertaan%20seluruh%20pihak%20%28Barber%3A2001%29.diakses pada tanggal 10 Maret 2022) pada tanggal 10 Maret 2022

sosial.⁵ Dengan demikian, untuk memberikan atau mengasah serta mengembangkan kemampuan yang cenderung sudah ada pada siswa, seharusnya orang tua ataupun pihak tertentu tidak memaksakan kehendak anak untuk madrasah yang sesuai keinginan orang tua ataupun pihak lain.⁶ Hal ini selaras dengan usulan Djati Sidi yang memberikan dua gagasan, yang diharapkan cocok dengan zaman sekarang.

Pertama, mengubah paradigma mengajar (*teaching*) menjadi belajar (*learning*) dengan maksud bagaimana proses belajar bersama antara guru dan siswa, kemudian yang kedua; proses yang tidak lagi mementingkan subject yang akan tetapi suasana yang menyenangkan saat proses pembelajaran sehingga memberikan efek positif, berfikir intuitif dan holistik pada siswa.⁷ Menurut Tilaar, pendidikan demokratis mempunyai dua pengertian. Pertama, proses pendidikan demokratis ditujukan untuk mengembangkan akal budinya agar individu dapat mengambil keputusan sendiri, bertanggung jawab terhadap

dirinya sendiri dan juga ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, mengadakan pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai kepuasan yang bermanfaat secara kolektif. Kedua, pendidikan demokratis harus mempunyai sistem yang demokratis dalam arti tidak membedakan antara individu satu dengan individu lain dan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar yang bebas dan bermutu untuk semua masyarakat.⁸

Menurut Rosyada, madrasah demokratis adalah madrasah yang dikelola dengan struktur demokratis seperti pelibatan masyarakat (*stakeholder* dan *user* madrasah) dalam membahas program-program madrasah, mengambil keputusan, pertanggung jawaban kepada publik, memberikan perhatian yang sama pada semua siswa dan tidak membedakan antara individu satu dengan yang lain, serta memberikan pengalaman-pengalaman praktik demokrasi bagi anak-anak berupa perhatian yang seimbang terhadap semua siswa tanpa membedakan antara mayoritas dengan minoritas dalam madrasah.⁹ Tidak kalah pentingnya juga dalam hal ini aspek empati antar sesama

⁵ Umar Tirtarahadja dan S. L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Cet-3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), 226

⁶ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Jakarta: Logos, 2011), 27-28

⁷ Indra Djati Sidi, *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, 24-27

⁸ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional; Suatu tinjauan Kritis*, 123-126.

⁹ Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, cet ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 18.

seharusnya ditingkatkan, karena dengan ditingkatkannya rasa berempati antar sesama maka kualitas pendidikan maupun madrasah demokratis akan semakin sehat.¹⁰

Dalam sejarah pertumbuhan pendidikan manusia, ada satu penggal sejarah yang diwarnai dengan pertentangan antara pendidikan yang dijalankan secara demokratis dan sebaliknya yang dilaksanakan dengan otoriter.¹¹ Untuk itu muncullah suatu aliran progresivisme yang merupakan sebuah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada pentingnya pendidikan demokratis dengan tokohnya yang terkenal John Dewey subur dan berkembang di masyarakat barat.¹² Aliran ini menunjukkan bentuk konfrontasi atas sistem pendidikan yang mengedepankan sistem otoriter dalam penerapannya.

¹⁰ Michael E. Morrell, "Empathy and Democratic education," *Public Affairs Quarterly* Vol. 21 No. 4 (2017), 381

¹¹ Pada kenyataannya pendidikan dalam kategori demokrasi ini lebih banyak berkembang di masyarakat barat sedangkan kategori otoriter lebih banyak berkembang di dunia timur, meskipun tentu di barat juga ada praktik-praktik pendidikan otoriter begitu pula sebaliknya di timur juga banyak praktik pendidikan demokratis, namun pernyataan diatas menunjukkan kecenderungan umum.

¹² Sebuah pengantar oleh Imam Barnadib, *Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme Joh Dewey*, (Yogyakarta; Safiria Insani press, 2014), p. xi.

John Dewey merupakan tokoh pendidikan yang mencetuskan sistem pendidikan demokratis dan merupakan orang paling bertanggungjawab dalam perancangan pendidikan orang Amerika sekaligus bertanggungjawab atas kehidupan moral bangsa ini. Pemberdayaan yang difokuskan kepada peserta didik dalam hal ini adalah siswa. Inilah yang dilakukan oleh seorang pemikir dan penggagas dalam hal ini seorang pemimpin madrasah untuk mengajarkan betapa pentingnya kebebasan dalam kemajemukan yang senantiasa dijaga dengan tidak keluar dari norma-norma agama.

Pemberdayaan keberagaman dan kemajemukan masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran serta pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Keterlibatan generasi muda khususnya kaum siswa dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi di Madrasah juga banyak memberikan pengaruh yang besar. Lingkungan madrasah memiliki kekhasan tersendiri dalam mengelola keberagaman dan kemajemukan yang ada. Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, Kepala Madrasah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan kebijakan-kebijakan madrasah. Dengan demikian lembaga pendidikan madrasah seyogyanya juga dapat menjadi media strategis dalam menerapkan Pendidikan

Demokrasi, karena lembaga madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan yang bertumpu pada proses mengembangkan potensi peserta didik (siswa) yang notabene adalah warga negara. Para siswa adalah penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber insan bagi pembangunan Nasional. Melalui proses pendidikan demokrasi dapat menghasilkan manusia yang demokratis yang memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa masyarakat demokratis dapat memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan secara baik dan benar.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Zamroni, bahwa pendidikan harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia-manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka.¹³ Kehidupan masyarakat yang demokratis harus didasarkan pada kesadaran warga bangsa atas ide dan cita-cita demokrasi yang melahirkan kesadaran dan keyakinan bahwa hanya dalam masyarakat demokratis lah dimungkinkan warga bangsa untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kebebasan. Istilah demokrasi sendiri sebagai paham kebebasan yang mendunia, telah merambah ke berbagai pelosok

lapisan kehidupan masyarakat namun tidak cukup banyak dipahami secara matang.

Dari keterbatasan pemahaman dan pengetahuan tentang demokrasi tersebut, ditambah adanya perbedaan persepsi yang mendasar tentang demokrasi dalam mengimplementasikan, sehingga demokrasi sering disalah artikan. Untuk menyikapi hal ini maka perlunya sebuah kedewasaan dan kematangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya demokrasi. Sundawa (2011), berpendapat “ketidak matangan, ketidak dewasaan, dan ketidak arifan warga negara dalam mengimplementasikan demokrasi tidak terlepas dari kurang berhasilnya penanaman nilai-nilai demokrasi dalam dunia pendidikan.”¹⁴

KAJIAN TEORETIK

Demokrasi merupakan sebuah proses, dimana dalam pembelajaran demokrasi dibutuhkan proses yang teliti dan cermat guna terwujudnya demokrasi yang genuine (asli). Hal ini sejalan dengan pendapat Darmawan, yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah sebuah proses dan dalam prosesnya bukanlah milik penguasa melainkan milik

¹³ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, (Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011) 39.

¹⁴ Darmawan. *Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara Muda Melalui Perwujudan Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Demokrasi*. Disertasi. Doktor pada Prodi SPs PKn UPI Bandung, Koleksi Tesis Perpustakaan UP, 2011.

rakyat karena rakyat merupakan ruh dari kehidupan demokrasi itu sendiri. Sehingga upaya demokratisasi dianggap sebagai pembelajaran demokrasi yang berorientasi kepada ideologi bangsa yaitu Pancasila, karena menurut Darmawan bahwa demokrasi itu tergantung pada ideologi suatu bangsa. Pembudayaan demokrasi yang sering dikenal dengan istilah proses demokratisasi, dipahami sebagai kondisi dimana di dalam prosesnya dibutuhkan media sebagai pendukung proses tersebut. Dalam pembudayaan demokrasi atau disebut pendidikan demokrasi, media sangat berperan penting khususnya bagi seorang pendidik.

Nilai-nilai demokrasi dan civic disposition sangat berkaitan erat. Winataputra dan Budimansyah, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *civic disposition* adalah kepribadian yang mencakup kesopanan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, skeptisisme pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajegan, keharuan, kemurahan hati,

dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.¹⁵

Dalam mengembangkan *civic disposition* siswa yang unggul, mandiri, madrasah memiliki tujuan tersendiri. Sebagaimana tujuan pendidikan madrasah seperti yang dikemukakan oleh Mastuhu, untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat dan berkhidmat kepada masyarakat, mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama dan menegakkan Islam dan kejayaan umat, mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Dari tujuan madrasah, dipahami bahwa pengembangan *civic disposition* sangat dibutuhkan siswa, sehingga dengan demikian siswa akan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan siswa di madrasah pada umumnya.

Hal ini bisa kita lihat dari keteraturan dan kedisiplinan madrasah dalam mengkondisikan siswa nya. Selain itu siswa akan terjaga dan dapat menerapkan nilai-nilai demokratis secara baik di lingkungan madrasah dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi pembeda antara madrasah dan pendidikan formal. Dhofier

¹⁵ Mastuhu, M. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 43.

(1982), berpendapat “madrasah merupakan salah satu “benteng moral bangsa dan indigenous Indonesia”. Madrasah sebagai lembaga pendidikan sangat diharapkan peran sertanya dalam menumbuhkan dan membudayakan nilai-nilai demokrasi.¹⁶ Sehingga pemahaman nilai-nilai demokrasi kepada siswa melalui pengembangan *civic disposition* siswa, mampu menghadapi realitas sosial dalam kehidupan.

Penanaman nilai-nilai demokrasi ini dilakukan dalam rangka membina siswa agar mereka tidak tercabut dari akar budaya demokrasi yang seutuhnya ketika mereka berhadapan dengan realitas sosial budaya di era globalisasi. Untuk mengembangkan *civic disposition* siswa, proses pendidikan yang dilakukan di madrasah dengan berbagai cara yaitu: keteladanan; latihan dan pembiasaan; mendidik melalui *ibrah* (mengambil pelajaran); mendidik melalui *mauidzah* (nasehat); mendidik melalui disiplin; dan mendidik *targhib wa tahdzib* (bujukan dan ancaman).

Pembentukan warga negara yang demokratis sebagai unsur pengembangan kompetensi Civic Disposition. Sehubungan dengan itu, Winataputra dan Budimansyah, menjelaskan bahwa *Civic Education* memiliki paradigma dasar yaitu Civic Culture. Sedangkan Civic

Culture memiliki ketergantungan dan saling ketergantungan (*interdependence*) dengan *political culture*.¹⁷ Kemudian *Civic Culture* sendiri menjadi pengembang dari elemen penting *civic education* yaitu *civic virtue* dan *civic virtue* sendiri berkaitan dengan domain psikososial individu yang secara substantif mengembangkan unsur *civic disposition* dan *civic commitments*. Hal inilah yang diperlukan untuk kebiasaan berpikir warga negara demi berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Jadi dapat dipahami bahwa *civic education* berhubungan erat dengan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan *Civic Culture* dan dengan *Civic Culture* tumbuhlah elemen *civic disposition* dan *civic commitments* pada warga negara. Dengan *civic dispositions* dan *civic commitments* tersebut diyakini dapat melahirkan *the common good* atau terwujudnya kemaslahatan kepentingan umum.

Hal di atas tentunya sejalan dengan apa yang dirangkum oleh Winataputra dan Budimansyah yakni elemen *civic culture* yang paling sentral dan sangat perlu dikembangkan adalah

¹⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Madrasah*, (Jakarta:LP3ES, 2011), 25

¹⁷ Winataputra, U.S dan Budimansyah D. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional, Konteks, Teori dan Profil Pembelajaran*, (Bandung : Widya Aksara Press, 2012), 234-235

civic virtue. *Civic virtue* yang dimaksud adalah kemauan warganegara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.¹⁸ *Civic virtue* sendiri secara substantif memiliki dua unsur yaitu unsur *civic dispositions* dan *civic commitments*. *Civic dispositions* yang dimaksud adalah sikap dan kebiasaan berfikir warganegara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Sementara *civic commitments* yang dimaksud adalah komitmen warganegara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional.

Demokrasi yang sesungguhnya lahir dari adanya hak-hak manusia orang per orang dan yang harus diakui serta dipraktikkan. Karena itu walau kata demokrasi sudah lama dikenal, namun tidaklah ia serta merta atau ketika itu telah melahirkan substansi dari apa yang dimaksud dengan demokrasi. Kata *demos* yang digunakan oleh orang Yunani Kuno yang darinya lahir kata demokrasi, tidak menunjukkan substansi makna demokrasi, karena kata itu pada mulanya bermakna tempat yang dihuni oleh satu suku. Keterlibatan aneka suku itu dalam pemilihan dan pemerintahan bukan lahir

dari dorongan pengakuan atas hak setiap individu, atau dorongan penghormatan terhadap manusia, tetapi lahir dari pengakuan tentang hak suku yang bertujuan menghindari pembangkangan mereka dalam kerja sama atau pertahanan. Demokrasi baru dapat dikatakan tercipta apabila kebebasan yang bertanggung jawab dapat diwujudkan dan pengakuan akan hak-hak asasi bagi setiap individu telah ditegakkan, bukan persamaan hak-hak kelompok semata-mata dan bukan pula untuk tujuan menghimpun aneka kekuatan sosial yang ada.¹⁹

Ada beberapa teori tentang keadaan alamiah manusia, diantaranya adalah teori yang dikemukakan oleh John Locke yang memandang bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Secara alamiah manusia berada dalam keadaan bebas dan berkedudukan sama. Karena bebas dan sama, maka tidak ada orang yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta orang lain. Hanya saja, ketika ada pergeseran nilai dan tata sosial, perilaku manusia lebih menunjukkan kerakusan dan ingin menguasai sendiri. Hal ini senada dengan pandangan J.J. Rousseau bahwa sifat alamiah manusia pada dasarnya memiliki *natural goodness* (kebaikan-kebaikan

¹⁸ Winataputra, U.S dan Budimansyah D. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Internasional, Konteks, Teori dan Profil Pembelajaran*, (Bandung : Widya Aksara Press, 2012), 234-235

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, 400.

alamiah).²⁰ Manusia dalam keadaan tersebut bukanlah manusia yang menyenangkan peperangan dan kerusakan, penghianatan, dan seterusnya.

METODE PENELITIAN/RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan dan menganalisis masalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Dalam penelitian kualitatif ini, pengolahan data dan hasilnya bersifat deskriptif dalam bentuk penjelasan tentang anak dan perilaku yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian adalah MAN 2 Pandeglang, madrasah dan *boarding school*. Peneliti mengumpulkan data melalui beberapa tahapan, seperti observasi dan observasi langsung di lokasi penelitian. Wawancara beberapa informan di lokasi penelitian. Mengkaji bahan dan data dokumentasi, menganalisis dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak madrasah kepala madrasah, guru, dan wali siswa MAN 2 Pandeglang. Sumber dari pengumpulan data, dianalisis dalam bentuk reduksi, display data dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada tahap

awal pengumpulan data, selanjutnya dilakukan reduksi data diurutkan dalam bentuk catatan, kemudian dikatakan memahami data, yang kemudian disimpulkan dari data yang dikaji dan ditelaah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang telah dilakukan di lingkungan MAN 2 Pandeglang dapat terlihat bahwa mereka telah memiliki karakter nilai-nilai demokrasi yang ditunjukkan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun pada saat kegiatan yang dilakukan seperti ketika ada kegiatan pemilihan ketua OSIS maupun Ketua asrama. Kemudian dalam pembelajaran di dalam kelas dengan keterbatasan mereka yang jelas terlihat namun tetap memiliki semangat untuk menerima pengajaran dan segala sesuatu wawasan baru dari gurunya. Meskipun siswa MAN 2 Pandeglang telah memiliki karakter demokrasi dari hasil strategi penanaman yang dilakukan oleh guru, karakter tersebut tetap harus dibina kembali agar dapat memperoleh perbaikan-perbaikan yang lainnya.

Dalam penanaman nilai-nilai demokrasi diperlukan sebuah strategi dan juga proses. Strategi tersebut merupakan cara ataupun metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

²⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 47-51.

Para dewan guru di MAN 2 Pandeglang dalam melakukan strategi proses menanamkan nilai-nilai demokrasi pada anak didiknya memiliki strategi yang terkadang sama dan terkadang beda dengan instansi sekolah lainnya.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara dan observasi yang telah diuraikan pada sub bab hasil penelitian, dimana antara lembaga sekolah dan madrasah yang lain, di MAN 2 Pandeglang memiliki cara atau strategi ada yang sama dan ada yang beda pula. Hal itu dikarenakan keadaan dan kekurangan siswa berbeda-beda serta keterbatasan yang dimiliki oleh anak didiknya memang tidak sama itu semua bisa disebabkan faktor usia. Artinya ada kaitannya kemampuan yang dimiliki oleh anak didiknya dengan umur atau usianya meskipun secara jenjang pendidikan juga berbeda, yang menjadi faktor utama dalam penentuan strategi adalah kemampuan individu masing-masing.

Dalam proses penanaman nilai-nilai demokrasi pada siswa MAN 2 Pandeglang, para guru memiliki peranan yang sangat penting. Mereka memiliki strategi atau cara berhubungan dengan penanaman nilai-nilai demokrasi yang dilakukan kepada anak didiknya dapat ditinjau dengan teori dari Thomas Lickona yakni melalui konsep tiga komponen karakter baik antara lain : (1).

Pengetahuan Moral, (2). Perasaan Moral, (3). Tindakan Moral. Maka dapat ditinjau sebagai berikut.

Moral knowing (Pengetahuan Moral). Salah satu cara dalam memberi peserta didik tentang pengetahuan moral akan demokrasi adalah dengan memberikan pengertian dan contoh secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa strategi dalam memberikan pengertian dan contoh langsung ke lapangan melalui tugas-tugas sekolah merupakan cara yang digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai demokrasi.

Jika ditinjau dengan teori yang dikemukakan oleh Albert Bandura dengan komponen karakter baik. Maka kegiatan ini dapat dijadikan cara untuk dapat memberikan pengetahuan moral kepada anak didik, dimana dalam poin pengetahuan moral memiliki beberapa aspek yang ditonjolkan sebagai tujuan pendidikan karakter. Maka strategi dengan cara memberikan pengertian dan contoh langsung ke lapangan melalui tugas-tugas sekolah dapat digunakan dalam memperoleh tujuan pendidikan karakter dalam hal mengetahui nilai moral yang terkandung dalam demokrasi tersebut. Dimana dalam aspek demokrasi ini terkandung nilai-nilai moral yang seluruhnya menjadi warisan moral yang

diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu dengan memberikan pengertian dan contoh langsung ke lapangan melalui tugas-tugas sekolah akan dapat memberikan pemahaman tentang nilai-nilai moral yang terkandung dalam demokrasi.

Aspek lain yang juga dapat diwujudkan melalui strategi memberikan pengertian dan contoh langsung, dalam hal aspek pemikiran moral dimana pemahaman apa yang dimaksud dengan moral dan mempelajari apa yang dianggap sebagai moral yang baik dan apa yang dianggap sebagai moral yang tidak baik. Selain aspek tersebut, dalam pengetahuan moral juga memiliki aspek pengetahuan pribadi yang mengharuskan seseorang untuk dapat menilai sendiri moral yang ada pada dirinya. Tentunya strategi dengan memberikan pengertian dan contoh langsung ke lapangan melalui tugas dari guru yang dilakukan oleh guru di MAN 2 Pandeglang akan dapat membantu memperoleh tujuan daripada kedua aspek tersebut. Mengingat fungsi daripada memberikan pengertian dan contoh langsung adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam hal ini melihat dari sudut pandang karakter penanaman nilai-nilai demokrasi.

Moral feeling (Perasaan Moral). Langkah berikutnya setelah memberi pengetahuan terhadap pesertadidik adalah

dengan cara perasaan moral dan hal itu dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan secara langsung dan menasehati. Strategi lain yang dilakukan dalam penanaman nilai-nilai demokrasi yakni; memperlihatkan secara langsung dan menasehati. Metode ini bertujuan untuk dapat menumbuhkan kesadaran moral anak didik agar memiliki kesadaran akan pendidikan karakter nilai-nilai demokrasi sehingga mereka mau melakukan perilaku dan sikap moral baik yang terkandung dalam demokrasi. Cara ini juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menumbuhkan penyadaran akan pentingnya moral demokrasi melalui kejadian atau kegiatan yang dilakukan secara nyata ataupun melalui media. Jika ditinjau dari pemikiran Thomas Lickona, maka strategi ini akan dapat digunakan dalam komponen poin kedua yakni perasaan moral. Dimana dalam komponen ini melihat sisi emosional seseorang yang terlihat seberapa jauh kita peduli tentang karakter baik dan dapat mengarahkan apakah pengetahuan moral kita mengarah pada perilaku kita.

Dalam komponen ini juga memiliki beberapa aspek yang ditonjolkan untuk mendidik emosional moral. Jika ditinjau dari aspek yang ada maka strategi memperlihatkan secara langsung dan menasehati dapat dijadikan cara untuk mewujudkan tujuan beberapa aspek

misalnya aspek hati nurani yang memiliki sisi emosional (merasa berkewajiban untuk melakukan apa yang benar). Dimana seseorang harus memiliki hal tersebut, tentu strategi memperlihatkan secara langsung dan menasehati bisa digunakan dalam mewujudkan aspek tersebut. Aspek lain yang dapat diwujudkan dengan strategi memperlihatkan secara langsung dan menasehati, dalam hal aspek empati dituntut untuk memiliki pengalaman seolah-olah yang terjadi di depan mata dan kepada orang lain terjadi pada diri kita sendiri.

Aspek mencintai hal yang baik, ketika orang mencintai hal baik maka orang tersebut senang melakukan hal yang baik dan ketika melihat hal yang baik maka memiliki keinginan untuk melakukan hal yang baik tersebut, bukan hanya menjadi penonton saja. Kedua aspek tersebut agar memperoleh tujuan yang diinginkan dapat dilakukan strategi dengan cara memperlihatkan secara langsung dan menasehati seperti yang dilakukan oleh guru di MAN 2 Pandeglang. Karena melihat fungsi strategi tersebut yang dilakukan agar dapat memperoleh kesadaran atas apa yang dilihat dan mengetahui apa yang sedang dilihat dimana dalam hal ini melihat dalam konteks moral yang terkandung dalam demokrasi.

Moral action (Tindakan Moral). Langkah berikutnya setelah memberikan akan pengetahuan moral dan perasaan moral adalah dengan tindakan moral dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memantau dan mengingatkan terus menerus. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa dengan memantau dan mengingatkan terus menerus dilakukan agar anak didik dapat terbiasa atau memiliki kebiasaan dalam perilaku demokrasi. Strategi ini dapat digunakan dan ditinjau dengan pemikiran Thomas Lickona pada poin tindakan moral dimana merupakan hasil dari bagian poin komponen karakter lainnya. Apabila seseorang memiliki kualitas moral kecerdasan dan emosi maka mereka mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan benar.

SIMPULAN

Untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan Islam, ada strategi yang dilakukan oleh pengelola MAN 2 Pandeglang tersebut dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar dan juga mengadakan kegiatan rutin yang berhubungan dengan perilaku yang demokrasi. Di dalam kegiatan belajar mengajar sendiri cara yang dilakukannya dapat berbagai macam seperti metode yang tepat untuk menyampaikan materi serta penggunaan bahasa yang mudah

difahami oleh para santri. Sedangkan untuk kegiatan rutinannya yang selalu di adakan di MAN 2 Pandeglang dapat dilakukan dengan cara memberikan tugas sesuai kemampuannya masing-masing. Faktor utama penghambat strategi penanaman nilai-nilai demokrasi ini adalah kemampuan intelektual atau kemampuan berfikir para santri yang bermacam-macam, itu semua dikarenakan kurangnya istirahat sehingga mengakibatkan ngantuk pada proses belajar mengajar berlangsung. Sehingga materi yang disampaikan oleh dewan guru sangat susah dimengerti dan difahami.

Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam penguatan Pendidikan Islam berlangsung hanya sebatas kemampuan berfikir dan kurangnya waktu pembelajaran. Sekalipun ada beberapa kendala yang itu semua diakibatkan kurangnya waktu tidur bagi mereka sehingga sering dijumpai di pondok atau di forum pembelajaran para santri banyak yang menguap atau ngantuk. Banyak dari dewan guru atau pengelola pondok yang melakukan atau mengatasi keadaan tersebut dengan menggunakan solusi mengulangi materi agar santri yang keinggalan materi bisa mengikuti kembali pembelajaran tersebut. Solusi tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengulangan materi supaya yang beralasan ngantuk tersebut bisa mengikuti

materi yang sudah dijelaskan, serta menggunakan bahasa yang sederhana karena komposisi santri disitu bermacam-macam agar dapat mudah difahami.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Tilaar, H.A.R. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: PT Rineka Cipta, cet. Pertama, 2006.
- Laudan Aron and Pamela Loprest, "Disability and the Education System," *The Future of Children* Vol. 22 No. 1., 2012.
- Tirtarahardja, Umar dan S. L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*. Cet-3 (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2018).
- Djati Sidi, Indra. *Menuju Masyarakat Belajar; Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Logos, 2011.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, cet ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Morrell, Michael E. "Empathy and Democratic education," *Public Affairs Quarterly* Vol. 21 No. 4., 2017.
- Imam Barnadib, *Pendidikan Partisipatif, Menimbang Konsep Fitrah dan Progresivisme Joh Dewey*, Muis Sad Iman (editor). Yogyakarta; Safiria Insani press, 2014.
- Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, 2011.
- Darmawan. "Membangun Kecerdasan Berdemokrasi Warga Negara

- Muda Melalui Perwujudan Kelas Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Laboratorium Demokrasi.” Disertasi. UPI Bandung, 2011.
- Zamroni. *Pendidikan Pancasila*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Utama, 2011.
- Zuriah, Nurul. *Nilai-nilai Karakter Bangsa*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Arif, Syaiful. *Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Marimba, Ahmad. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Prenada, 2010.
- Suseno. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- B. Mayo, Hendri. *Nilai Demokrasi*. Bandung: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Rauf, Maswadi. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Aqib, Zainal. *Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Notonagoro. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Rahman Alamsyah, Andi. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat*. Bandung: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Kurniasih, Imas dan Berlin Sani, *Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Kata Pena, 2016.
- Darmadi, Hamid. *Partisipasi dan Demokrasi*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Fathurrohman, Muhammad. *Islam dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Ratnawulan, Elis dan Rusdiana. *Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Yusuf, A. Muri. *Demokrasi Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sunarti dan Selly Rahmawati. *Demokrasi*. Yogyakarta: CV Andi, 2014.
- Amirono. *Pembelajaran dan Standar Proses Berkarakter*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016.
- Syah, Muhibbin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010.
- Russel, Bertrand. *Pendidikan dan Tatahan Sosial*, (terj). Ahmad Setiawan Abadi. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Ahmadi, Abu. *Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Bandung; Remaja Karya, 1988.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Bahri Djamarah, Syaiful. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2000.
- Syah, Darwian. *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta; Gaung Persada Press, 2017.
- Trianto. *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif, Progresif (Konsep, Landasan, dan Implementasinya dalam KTSP)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syam, Nur. *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Negara, Demokrasi dan Civil Society*.

- Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Dewey, John. *DEMOCRACY AND EDUCATION An Introduction to the Philosophy of Education*. Laxmi Nagar, Delhi: AAKAR BOOKS.
- Cahya Setiadi, Alif. "Konsep Demokrasi Pendidikan Menurut John Dewey", dalam <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/585.pdf>, diakses 31 Desember 2016.
- .